

## PARTISIPASI POLITIK ETNIK TIONGHOA: TANTANGAN DAN HAMBATAN

Andreas Ambrosius Susanto

Program Studi Sosiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,  
[susanto.andreas@gmail.com](mailto:susanto.andreas@gmail.com)

### ABSTRAK

*Tulisan ini mengeksplorasi hambatan dan tantangan terhadap partisipasi politik etnik Tionghoa di Indonesia. Etnik Tionghoa secara historis kurang terwakili di lembaga politik, keterlibatan mereka dalam partai politik, parlemen, pemerintah, dan masyarakat sipil masih terbatas. Dengan mengkaji konteks historis dan kontemporer, makalah ini menyoroti hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh etnik Tionghoa untuk mewujudkan partisipasi politiknya. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian literatur dan analisis deskriptif dalam meninjau secara kritis dan komprehensif hambatan dan tantangan yang mempengaruhi partisipasi politik etnik Tionghoa. Hasil kajian menemukan bahwa sejak Orde Baru, etnik Tionghoa telah menghadapi hambatan dan tantangan yang signifikan dalam partisipasi politiknya, termasuk diskriminasi, dan pengucilan dari proses dan lembaga politik. Stereotip negatif, politik identitas, dan kekerasan rasial merupakan hambatan dan tantangan pada pasca Reformasi. Temuan ini menawarkan rekomendasi kebijakan dan program untuk mempromosikan inklusivitas dan keragaman dalam politik, perlindungan kelompok minoritas, yang dapat berdampak positif bukan hanya bagi etnik Tionghoa dan kelompok minoritas lainnya, juga pada proses demokrasi secara keseluruhan.*

**Kata Kunci:** Partisipasi politik; Etnik Tionghoa, Tantangan dan hambatan

### 1. PENDAHULUAN

Partisipasi politik merupakan aspek mendasar dari pengembangan masyarakat demokratis. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, masuknya semua kelompok etnik dan budaya dalam proses politik sangat penting untuk pembangunan dan stabilitas suatu bangsa. Meskipun merupakan kelompok minoritas yang signifikan, etnik Tionghoa di Indonesia relatif kurang terwakili dalam institusi politik. Oleh karena itu, memahami tantangan dan hambatan yang mempengaruhi partisipasi politik mereka, penting untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan yang mendorong partisipasi dan perwakilan politik mereka. Partisipasi politik etnik Tionghoa di Indonesia dapat dianalisis dari berbagai perspektif, termasuk keterwakilan atau representasi mereka dalam lembaga politik, dan keterlibatan mereka dalam partai politik.

Etnik Tionghoa merupakan salah satu etnis minoritas terbesar di Indonesia, yang terdiri dari sekitar satu persen lebih dari seluruh jumlah penduduk (Ananta, dkk, 2015; 14). Etnik Tionghoa memiliki sejarah panjang dan kompleks di Indonesia, dengan periode diskriminasi, marginalisasi, dan penganiayaan karena perbedaan etnis, agama, dan budaya mereka. Meskipun etnik Tionghoa sering dianggap memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia, tetapi perwakilan mereka di berbagai institusi politik secara historis relatif rendah.

Kerangka teoritis yang digunakan untuk menjelaskan hambatan dan tantangan yang dihadapi etnis Tionghoa dalam partisipasi politiknya adalah teori identitas sosial dan pendekatan politik identitas. Teori ini menunjukkan bahwa identitas sosial individu, seperti ras atau etnis, membentuk sikap, perilaku, dan interaksi mereka dengan orang lain. Konsekuensinya, ini dapat menyebabkan diskriminasi, prasangka, dan stereotip negatif

terhadap kelompok sosial lain, atau etnik yang termasuk dalam kelompok sosial yang distigma (Tajfel dan Turner, 1979). Pendekatan politik identitas merujuk pada aktivitas dan strategi politik yang menitikberatkan pembedaan dan penggunaan primordialisme. Ini dapat menimbulkan intoleransi, kekerasan, dan pertentangan antar berbagai kelompok sosial yang berbeda. Politik identitas akan mengarahkan pendapat masyarakat bahwa individu yang tidak sama identitasnya dengan mereka maka tak pantas menjadi pemimpin. Dengan begitu ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan pengucilan kelompok minoritas karena kehilangan hak politik yang sama dalam pemerintahan dan representasi politiknya.

Dalam kasus etnik Tionghoa di Indonesia, identitas etnis mereka telah menjadi hambatan utama bagi partisipasi politik mereka. Secara historis, etnik Tionghoa telah stigmatisasi dan diskriminasi karena identitas etnik mereka, yang menyebabkan pengucilan dari proses politik formal, akses terbatas ke pendidikan dan kesempatan kerja, dan kekerasan rasial. Hal ini menimbulkan rasa terancam, kurang aman, dan kurang diterima di kalangan etnis Tionghoa, yang pada gilirannya memengaruhi keinginan mereka untuk terlibat dalam partisipasi politik. Pertanyaan penelitian utama adalah “Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh etnik Tionghoa dalam partisipasi politik di Indonesia?”

## 2. METODE

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian literatur dan analisis deskriptif dalam mengeksplorasi secara komprehensif dan meninjau secara kritis hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh etnik Tionghoa dalam partisipasi politiknya. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal akademik, buku, surat kabar, dan sumber *online*. Selain itu, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat Tionghoa. Wawancara bersifat semi-terstruktur dan berfokus pada pengalaman politik, perspektif, dan tantangan yang dihadapi oleh etnik Tionghoa dalam partisipasi politik. Ini memungkinkan penulis untuk memperoleh wawasan mendalam tentang hambatan dan tantangan yang mereka hadapi. Analisis dari berbagai perspektif, termasuk keterwakilan mereka dalam lembaga politik, keterlibatan mereka dalam proses dan partai politik, untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Temuan-temuan tersebut kemudian disintesis untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang partisipasi politik etnik Tionghoa.

## 3. ANALISIS DATA

Etnik Tionghoa di Indonesia secara umum seringkali dipandang sebagai kelompok etnik yang hanya tertarik pada bidang bisnis, dan sama sekali tidak berminat untuk terlibat dalam politik. Etnik Tionghoa sering terjebak dalam dilema. Bila mereka aktif dalam politik, mereka akan dicurigai punya niat melawan penguasa, tetapi bila mereka mendukung penguasa akan dicap oportunistis. Bila mereka menghindari politik, mereka juga tetap akan dituduh oportunistis karena hanya tertarik untuk mencari keuntungan (Coppel, 1983).

Sejarah keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik sejak era kolonial sampai sebelum Orde Baru telah menunjukkan dinamika partisipasi politik mereka (Suryadinata, 1979; Coppel, 1983; Setiono, 2008). Untuk memperjuangkan kepentingan komunitasnya, beberapa politisi Tionghoa berhasil menjadi anggota Volksraad (parlemen di era kolonial Belanda). Pada tahun 1932, golongan Tionghoa peranakan yang dipimpin Liem Koen Hian dan Ko Kwat Tiong membangun Partai Tionghoa Indonesia, yang turut mendukung upaya pejuang kemerdekaan Indonesia. Beberapa tokoh masyarakat Tionghoa menjadi anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Selama perjuangan kemerdekaan (1945-1949), asosiasi organisasi kemasyarakatan Tionghoa (*Chung Hua Tsung Hui/CHTH*) di Yogyakarta mengadakan pengumpulan dana untuk mendukung pemerintah dan tentara republik. Pemerintah Republik di Yogyakarta

mengangkat Ir. Liem Ing Hwie (ketua CHTH) sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (Susanto, 2008).

Dari periode transisi menuju Demokrasi Terpimpin sampai dengan jatuhnya pemerintahan Sukarno, berbagai kebijakan pemerintah telah mendiskriminasi etnis Tionghoa di bidang ekonomi dan pendidikan (Coppel, 1983; 36-41). Tidak mengherankan, aktivitas politik dari golongan etnik Tionghoa yang paling menonjol digerakkan oleh Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki). Sejumlah pimpinan Baperki juga aktif di partai politik, dan ada yang diangkat menjadi menteri. Perjuangan organisasi massa yang didirikan tahun 1954 untuk penghapusan diskriminasi ini telah menarik keanggotaan 280 ribu orang dari etnik Tionghoa. Meskipun bukan partai politik, Baperki dapat ikut Pemilu 1955, dan mendapat satu kursi di DPR (Coppel, 1983; 44).

Setelah rezim Orde Baru berkuasa, partisipasi aktif etnik Tionghoa dalam politik berada di titik nadir. Periode antara 1966-1998 dapat dikatakan merupakan periode apatisisme politik di kalangan etnis Tionghoa. Aktivitas politik seperti yang dilakukan oleh asosiasi organisasi Tionghoa (CHTH), Partai Tionghoa Indonesia, atau Baperki telah menjadi sesuatu dari masa lalu. Beberapa studi (Suryadinata 1993; Setiono, 2008; Wu-ling, 2018) menyebut kebijakan diskriminasi dan asimilasi etnik Tionghoa yang dilakukan rezim Orde Baru telah memberi dampak yang besar terhadap proses depolitisasi etnik Tionghoa dan pengebirian partisipasi politik mereka. Berbagai kebijakan dan hukum (seperti Instruksi Presiden Nomor 14/ 1967) tidak hanya melarang segala sesuatu yang berkaitan dengan kepercayaan, bahasa, tradisi dan budaya “China” dilakukan di arena publik, tetapi pemerintah juga menutup organisasi masyarakat, sekolah, dan pers Tionghoa. Meskipun diskriminasi dan marginalisasi politik dari pemerintah Orde Baru berperan dalam menurunkan moral dan mengecilkan hati etnik Tionghoa untuk berpolitik, namun hilangnya ketiga pilar masyarakat Tionghoa menjadi faktor sentral dari absennya orang Tionghoa dari aktivitas politik selama era Orde Baru (Susanto, 2006).

Etnik Tionghoa pada periode pasca-Suharto telah memperoleh kebebasan sosial budaya yang lebih besar, dan memperoleh peluang untuk lebih aktif dalam politik. Keterlibatan politisi Tionghoa dalam pemilu juga cenderung meningkat. Bila pada Pemilu 2009 terdapat 213 calon legislatif yang berasal dari etnis Tionghoa, pada Pemilu 2014 jumlahnya ada 315 calon (CNN, 5 Februari 2019). Pemilu legislatif 2019 mencatat rekor jumlah kandidat Tionghoa-Indonesia yang tinggi, antara 8-16 kandidat Tionghoa terpilih menjadi anggota parlemen di setiap pemilihan. (Suryadinata, 2019). Namun beberapa studi (Tanasaldy, 2013; Herlijanto, 2017; Setijadi 2017; Suryadinata, 2019) menunjukkan masih ada beberapa tantangan dan hambatan yang membatasi partisipasi dan representasi politik etnik Tionghoa.

### 3.1. Stereotip Negatif

Etnik Tionghoa telah distereotipkan sebagai "kaya", “eksklusif” dan "memiliki kompleks superioritas", yang kemudian menciptakan persepsi negatif dan prasangka buruk di antara banyak orang bahwa mereka arogan, asosial, mendominasi ekonomi Indonesia (Coppel, 1983). “Ketionghoan” mereka juga membawa konotasi negatif yang menggambarkan mereka sebagai orang asing atau orang luar (*The Outsider*) yang tidak loyal. Anggapan bahwa etnik Tionghoa lebih memilih untuk mempertahankan identitas kulturalnya daripada berasimilasi tidak hanya dilihat sebagai tanda eksklusivitas, tetapi juga dijadikan sebagai bukti ketidaksetiaan terhadap budaya dan identitas Indonesia. Lebih dari itu, etnik Tionghoa diklaim cenderung lebih loyal terhadap Tiongkok. Ini semakin melanggengkan pandangan yang menganggap mereka sebagai ‘asing’.

Persepsi lain yang memperparah gambaran negatif terhadap etnik Tionghoa adalah tentang “dominasi ekonomi” mereka. Meskipun angka-angka tentang dominasi ekonomi etnis Tionghoa mungkin kurang menggambarkan perekonomian Indonesia secara tepat, namun

kebanyakan masyarakat Indonesia tidak menganggap itu sebagai mitos belaka. Persepsi ini sering digabungkan dengan kecurigaan dari stereotip lama bahwa pengusaha etnis Tionghoa sering melakukan bisnis mereka secara “licik”. Selain itu, dominasi itu dipandang sebagai hal yang tidak pantas dan tidak semestinya, di mana orang “asing” menguasai kehidupan ekonomi orang “pribumi”. Di Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, pemerintah daerah tidak mengizinkan etnik Tionghoa untuk memiliki Hak Milik atas tanah (Susanto, 2008). Tidak mengherankan bila persepsi ini selalu membawa sentimen negatif dan perlakuan diskriminatif, dan sampai batas tertentu bahkan menimbulkan sikap permusuhan, kebencian, dan kekerasan rasial.

Prasangka rasial dan sentimen negatif terhadap etnik Tionghoa dewasa ini mungkin tidak lagi sekuat dan terbuka di masa sebelum Reformasi, namun persepsi kritis dan sentimen negatif terhadap mereka tetap ada, dan mungkin belum banyak berubah (Herlijanto, 2017). Etnis Tionghoa akan menghadapi kesulitan untuk menavigasi lanskap ini karena stereotip negatif dan diskriminasi terhadap mereka. Sebuah survei yang diadakan oleh ISEAS dan Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2017 menegaskan adanya prasangka negatif terhadap pengaruh etnik Tionghoa dalam politik dan ekonomi Indonesia, dan banyak *pribumi* percaya bahwa etnik Tionghoa Indonesia mungkin memiliki loyalitas nasional yang terbagi (Setijadi, 2017). Survei itu seperti menunjukkan apa yang pernah ditulis Coppel (1983) sebagai adanya anggapan umum di masyarakat bahwa “sekali Cina tetap Cina.” Dengan demikian, stereotip ini pada gilirannya membuat mereka akan terus dipandang kurang pantas, kurang dapat dipercaya, dan kurang bisa mewakili kepentingan masyarakat Indonesia secara lebih luas. Akibatnya ini sampai batas tertentu akan menyulitkan mereka mendapatkan akses ke jaringan politik, untuk membangun aliansi politik, dan mendapatkan dukungan dari masyarakat dan elite politik. Pada akhirnya itu akan menjadi tantangan dan hambatan terhadap peluang partisipasi dan representasi politik mereka.

### **3.2. Politik Identitas, Politik Elektoral, dan Kekerasan Rasial**

Kuatnya politik identitas di Indonesia yang mengedepankan afiliasi etnisitas dan agama komunitas sampai batas tertentu dapat meminggirkan atau mengeksklusi etnik Tionghoa dari arena politik. Fitur yang sangat menonjol dalam politik Indonesia ini menjadikan identitas etnik dan agama sering dimobilisasi untuk tujuan politik. Partai politik dan para kandidatnya seringkali mengandalkan identitas etnik dan agama untuk membangun dukungan. Tantangan politik identitas ini terlihat dari pengalaman William (caleg muda beretnis Tionghoa dan beragama Kristen di dapil Jakarta) yang sering merasa dipandang sebelah mata, dan ditolak warga saat berkampanye (Harbowo, 2022). Di mata kebanyakan etnis Tionghoa, penggunaan narasi “anti-Cina” sepanjang pemilihan gubernur Jakarta dan kasus penjatuhan ‘Ahok’ bukan hanya menunjukkan kerentanan politik mereka, tetapi juga menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan akan peluang partisipasi politik mereka.

Dalam politik elektoral Indonesia dengan cara penentuan daerah pemilihan dan sistem daftar partai terbukanya, ditambah dengan jumlah orang Tionghoa yang relatif sedikit dan komunitasnya yang heterogen, calon dari etnik Tionghoa akan menghadapi kesulitan yang besar untuk dipilih sebagai anggota legislatif mewakili partainya di parlemen (Suryadinata, 2019; Chen, 2021). Banyak etnis Tionghoa terkonsentrasi di daerah perkotaan, yang dapat mengakibatkan suara mereka terdilusi di berbagai distrik. Heterogenitas komunitas Tionghoa juga membuat calon tidak dapat sepenuhnya mengandalkan dukungan dari mereka, sementara kentalnya politik identitas tidak memberikan harapan untuk memperoleh dukungan dari mereka yang berbeda identitasnya. Semua itu jelas akan mempersulit mereka untuk mengamankan massa kritis suara di daerah pemilihan, dan karenanya membatasi peluang mereka untuk memenangkan kursi. Bahkan seorang informan secara pesimis mengatakan: “dengan model pemilihan seperti itu, caleg Tionghoa tidak akan pernah mendapatkan suara

yang dibutuhkan untuk menjadi wakil partai di Dewan. Mungkin harus ada afirmasi atau dispensasi dari partai supaya caleg Tionghoa bisa jadi” (Imam, 2023).

Sepanjang sejarah Indonesia, etnik Tionghoa diliputi oleh rasa tidak aman dan kecemasan, karena serangan kekerasan rasial yang terus-menerus dialamatkan kepada mereka. Menjadi etnis Tionghoa saja boleh dikatakan sudah menjadi label yang berisiko. Mereka sering dijadikan kambing hitam dan menjadi sasaran empuk eksploitasi dan kekerasan rasial di saat krisis ekonomi atau pergolakan politik (Susanto, 2011). Kerusuhan “anti-Cina” tidak berakhir pada Mei 1998, tetapi masih terus terjadi setelah Reformasi (Purdey, 2006; Coppel, 2008). Tidak diragukan lagi kerusuhan demi kerusuhan itu menciptakan bayang-bayang trauma yang memperkuat rasa tidak aman dan kerentanan yang terus-menerus. Hidup dalam iklim kekhawatiran dan ketidakpastian membuat etnik Tionghoa berpegang pada prinsip ‘*safety-first*’, meletakkan keamanan dan keselamatan di atas segala-galanya (Susanto, 2006). Kebanyakan etnis Tionghoa menganggap keterlibatan dalam arena politik formal berisiko mendatangkan ancaman bagi keamanan dan keselamatan mereka. Ini mungkin juga menjelaskan mengapa partai-partai berbasis etnis Tionghoa juga kurang memperoleh dukungan. Tambahan lagi, umumnya etnis Tionghoa seperti orang Indonesia kebanyakan lainnya tidak begitu antusias pada politik. Mereka lebih tertarik pada partisipasi politik informal melalui organisasi-organisasi sosial (Suryadinata, 2019).

#### 4. KESIMPULAN

Tulisan ini telah mengeksplorasi partisipasi politik formal etnik Tionghoa di Indonesia, dengan fokus pada tantangan dan hambatan yang mereka hadapi. Temuan menunjukkan bahwa sepanjang sejarah Indonesia, etnik Tionghoa telah mengalami kekerasan rasial, diskriminasi dan marginalisasi yang berujung pada pengucilan mereka dari proses dan lembaga politik. Pasca-Reformasi, etnik Tionghoa masih menghadapi hambatan dan tantangan yang signifikan untuk memasuki arena politik formal, termasuk stereotip negatif, politik identitas, sistem elektoral, dan bayang-bayang kekerasan rasial.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa mendorong inklusivitas dan keragaman yang lebih besar dalam politik Indonesia penting untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih inklusif dan representatif. Untuk itu kiranya diperlukan kebijakan afirmatif, promosi multikulturalisme, dan ketegasan negara dalam memberi perlindungan terhadap kelompok minoritas dari diskriminasi, marginalisasi dan kekerasan.

#### REFERENSI

- Ananta Aris, Evi Nurvidya Arifin, M. Sairi Hasbullah, dkk. 2015. *Demography of Indonesia's Ethnicity*. Singapore; ISEAS.
- Chen, J. 2021. *Representing Chinese Indonesians: Pribumi Discourse and Regional Elections in Post-Reform Indonesia*. (Journal of Current Southeast Asian Affairs, Vol.41, Issue 1:59-87).
- Coppel, C.A. 1983. *Indonesian Chinese in Crisis*. Kuala Lumpur; Oxford University Press.
- Coppel, C.A. 2008. *Anti-Chinese Violence in Indonesia after Soeharto*. Dalam Suryadinata (ed) *Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia*. Singapore; ISEAS.
- CNN Indonesia (5 Februari 2019). *Jatuh Bangun Etnis Tionghoa dalam Politik Indonesia*. Diakses pada 15 Februari 2023 di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190205120557-32-366561/jatuh-bangun-etnis-tionghoa-dalam-politik-indonesia>

- Harbowo, Nicolaus. 2022. *Jatuh Bangun Caleg Pendaftar Baru Menembus Parlemen*. Diakses pada 5 Februari 2023 di <https://www.kompas.id/baca/desk-politik-hukum/2022/02/16/jatuh-bangun-caleg-pendaftar-baru-menembus-parlemen>
- Herlijanto, J. 2017. Old Stereotypes, New Convictions: *Pribumi* Perceptions of Ethnic Chinese in Indonesia Today. (Trends in Southeast Asia; TRS 6/17). Singapore; ISEAS
- Imam. 2023. (wawancara, Yogyakarta, 5 Januari 2023).
- Purdey, Jemma. 2006. *Anti-Chinese Violence in Indonesia 1996-1999*. Singapore; Singapore University Press.
- Setijadi, C. 2017. *Chinese Indonesians in the Eyes of the Pribumi Public*. (ISEAS Perspective No.73, 27 September 2017). Diakses pada 20 Februari 2023 di [https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS\\_Perspective\\_2017\\_73.pdf](https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_73.pdf)
- Setiono, Benny Gatot. 2008. *Tionghoa dalam Pusaran Politik (Mengungkap Fakta Tersembunyi Orang Tionghoa di Indonesia)*. Jakarta; Transmedia Pustaka.
- Suryadinata, L. 1979. *Political Thinking of the Indonesian Chinese 190-1977: A Source Book*. Singapura: Singapore University Press.
- Suryadinata, L. 1993. *The State and Chinese Minority in Indonesia*. Dalam L. Suryadinata (ed), *Chinese Adaptation and Diversity: Essays on Society and Literature in Indonesia, Malaysia and Singapore*. Singapura: Singapore University Press.
- Suryadinata, L. 2019. *Chinese Participation in the 2019 Indonesian Elections*. (ISEAS Perspective. Issue: 2019, No. 58, 25 July 2019). Diakses pada 10 Maret 2023 di [https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS\\_Perspective\\_2019\\_58.pdf](https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2019_58.pdf)
- Susanto, Andreas. 2006. *Safety-First: Strategies of Managing Insecurity among Chinese Indonesians in Yogyakarta*. Dalam Juliette Koning & F. Husken (eds). *Ropewalking and Safety Nets. Local Ways in Managing Insecurities in Indonesia*. Leiden-Boston; Brill.
- Susanto, Andreas A. 2008. *Under The Umbrella of the Sultan. Accommodation of the Chinese in Yogyakarta During Indonesia's New Order*. (Dissertation. Radboud University Nijmegen).
- Susanto, Andreas. 2011. *Diversity in Compliance: Yogyakarta Chinese and the New Order Assimilation Policy*. Dalam Marleen D.J. Koning dan P.Post (eds). *Chinese Indonesians and Regime Change*. Leiden-Boston; Brill.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. 1979. *An integrative theory of intergroup conflict*. Dalam W. G. Austin, & S. Worchel (Eds.), *The Social Psychology of Intergroup Relations*. Monterey, CA; Brooks/Cole.
- Tanasaldy, Taufiq. 2013. *Opportunities and Challenges: social and political activism of the Indonesian Chinese in post-Reform Indonesia*. (Review of Indonesian and Malaysian Affairs, Vol.47, No.2: 91-116).
- Wu-Ling, Chong. 2018. *Chinese Indonesians in Post-Suharto Indonesia: Democratisation and Ethnic Minorities*. Hong Kong; Hong Kong University Press.